

ABSTRAK

Indonesia telah dijuluki sebagai *Dissarter Supermarket*, dengan kondisi tersebut mestinya mampu mengubah cara pandang dalam menangani bencana, birokrasi pemerintah harus lebih responsif terhadap kondisi darurat dengan cara mendesain cara kerja institusi yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model *intergovernmental network* dalam manajemen penanganan bencana banjir di tempat penelitian khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah individu birokrat yang dilihat dalam kapasitasnya dapat mewakili birokrasi pemerintah daerah setempat, individu anggota DPRD dalam kapasitasnya mewakili lembaga legislative, dan komponen masyarakat serta para stakeholders yang diambil dari unsur tokoh masyarakat, professional, LSM dan kelompok-kelompok kepentingan terkait dengan manajemen bencana (banjir).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membagi kerjanya ke dalam tiga bidang, yaitu pencegahan, penanganan, dan perbaikan. Namun, meskipun demikian, belum terdapat koordinasi yang terjalin dengan baik diantara wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Hal ini nampak dari peraturan daerah yang mengarahkan fungsi koordinasi kepada koordinasi intra wilayah, bukan inter wilayah. Kondisi ini mengakibatkan penanggulangan bencana di wilayah-wilayah tersebut berjalan secara parsial.

Kata kunci: model *intergovernmental network*, manajemen, penanganan bencana banjir